

## **BAB V**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **5.1. Kondisi Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah, Jumlah Penduduk, Investasi dan Indeks Pembangunan Manusia pada Provinsi yang Ada di Wilayah Sumbagsel**

Pada subbab ini membahas kondisi pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah, jumlah penduduk, investasi, dan indeks pembangunan manusia di wilayah Sumbagsel. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang pertama mengenai bagaimana perkembangan faktor-faktor tersebut mempengaruhi pembangunan di wilayah Sumbagsel. Pertumbuhan ekonomi di wilayah Sumbagsel menjadi perhatian utama, karena berperan signifikan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia. Di sisi lain, pengeluaran pemerintah diharapkan dapat mendukung pembangunan infrastruktur serta meningkatkan kualitas layanan publik yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan penduduk. Selain itu, laju pertumbuhan jumlah penduduk memiliki dampak penting terhadap dinamika ekonomi dan sosial di wilayah ini, baik dalam hal penyediaan lapangan kerja maupun tekanan terhadap sumber daya alam dan lingkungan. Investasi, baik domestik maupun asing, juga menjadi faktor kunci dalam menciptakan lapangan kerja baru dan memperkuat basis ekonomi daerah. Di samping itu, indeks pembangunan manusia (IPM) sebagai indikator kemajuan kualitas hidup masyarakat menjadi tolok ukur penting dalam menilai keberhasilan pembangunan di wilayah Sumbagsel.

##### **5.1.1 Pertumbuhan Ekonomi**

Kondisi pertumbuhan ekonomi di Sumatera bagian selatan menunjukkan perkembangan yang dinamis dan penuh potensi. Wilayah ini yang mencakup provinsi Lampung, Sumatera Selatan, Bengkulu, Bangka Belitung dan Jambi menghadapi tantangan serta peluang dalam sektor-sektor utama seperti pertanian, pertambangan, industri dan infrastruktur. Pertumbuhan ekonomi di wilayah ini

menjadi indikator penting bagi perkembangan keseluruhan pulau Sumatera, mencerminkan upaya pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dan daya saing regional. Adapun kondisi pertumbuhan ekonomi di Sumatera bagian Selatan yang tergambar dalam PDRB yaitu sebagai berikut :

**Tabel 5. 1 PDRB Harga Konstan pada 5 provinsi di Sumatera Bagian Selatan Tahun 2016-2022 (Milyar Rupiah)**

Provinsi	Tahun							Rata-Rata
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Sumatera Selatan	266,857	281,571	298,484	315,464	315,129	326,407	342,458	306,624
Jambi	130,501	136,501	142,902	149,111	148,448	153,881	161,730	146,153
Bengkulu	40,076	42,073	44,164	46,345	46,338	47,839	49,916	45,250
Bangka Belitung	47,848	49,985	52,208	53,941	52,699	55,360	57,805	52,835
Lampung	209,793	220,626	232,165	244,378	240,293	247,001	257,534	235,970
<b>Sumbagsel</b>	<b>695,075</b>	<b>730,756</b>	<b>769,923</b>	<b>809,239</b>	<b>802,907</b>	<b>830,488</b>	<b>869,443</b>	<b>786,833</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Berdasarkan Tabel 5.1 dapat dilihat bahwa rata-rata PDRB di Sumatera bagian selatan selama periode 2016-2022 yaitu sebesar 786,833 milyar rupiah yang mana pada tahun 2016 jumlah PDRB Sumatera Bagian Selatan sebesar 695,075 milyar rupiah, lalu pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 730,756 milyar rupiah. Jumlah PDRB terus mengalami peningkatan hingga tahun 2019 menjadi 809,239 milyar rupiah, PDRB di Sumatera bagian Selatan turut mengalami penurunan menjadi 802,907 milyar rupiah, kemudian perekonomian bangkit kembali dan PDRB meningkat menjadi 830,488 milyar rupiah pada tahun 2021 dan mengalami peningkatan di tahun 2022 menjadi 869,488 milyar rupiah. PDRB tiap provinsi di Sumatera bagian selatan terus mengalami kenaikan dari tahun 2016-2019 dan mengalami penurunan pada tahun 2020 akibat dari

munculnya pandemic covid-19 yang membuat perekonomian dunia lesu, namun keadaan tersebut hanya terjadi sesaat dimana pada tahun 2021 hingga 2022 PDRB tiap provinsi terus meningkat.

Rata-rata PDRB tertinggi di wilayah Sumatera bagian Selatan terdapat di Provinsi Sumatera Selatan yaitu sebesar 306,624 milyar rupiah. Peningkatan PDRB di provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2016 hingga 2022 terutama didorong oleh kontribusi dari berbagai sektor lapangan usaha, khususnya sektor pertambangan dan penggalian. Kabupaten Musi Banyuasin dan Muara Enim yang kaya akan sumber daya alam seperti minyak dan gas serta batubara menyumbang hampir 75% total PDRB di Sumatera Selatan (Kadora,2022)

Rata-rata PDRB terendah di wilayah Sumatera bagian Selatan terdapat di Provinsi Bengkulu yaitu sebesar 45,250 milyar rupiah. Rendahnya PDRB Provinsi Bengkulu dikarenakan pemerataan pembangunan belum terjadi secara maksimal dan pembangunan masih jauh tertinggal jika dibandingkan dengan daerah lainnya. Kinerja perekonomian Provinsi Bengkulu mengalami perkembangan yang relatif baik akan tetapi peningkatan PDRB tersebut tidak diikuti dengan laju pertumbuhannya (Dwiputra,2022).

### **5.1.2 Pengeluaran Pemerintah**

Pengeluaran pemerintah di Sumatera bagian selatan memainkan peran krusial dalam mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Setiap tahunnya, pemerintah pusat maupun daerah mengalokasikan anggaran yang signifikan dan provinsi-provinsi yang termasuk di bagian Sumbagsel menerima dana yang dirancang untuk mendukung inisiatif pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Pendanaan tersebut dialokasikan berbagai sektor seperti infrastruktur yang berguna untuk memperbaiki konektivitas antar daerah serta mendukung pertumbuhan sektor pertanian dan pariwisata. Selain itu pengeluaran pemerintah juga dialokasikan untuk meningkatkan akses pendidikan dan pelayanan kesehatan dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan strategi pengeluaran yang terencana, pemerintah berharap

untuk mengatasi disparitas pembangunan antar wilayah dan meningkatkan daya saing ekonomi di setiap wilayah termasuk Sumatera bagian selatan. Adapun pengeluaran pemerintah tiap provinsi di Sumatera bagian selatan yaitu sebagai berikut :

**Tabel 5.2 Pengeluaran Pemerintah pada 5 Provinsi di Sumatera Bagian Selatan Tahun 2016-2022 (Milyar Rupiah)**

Provinsi	Tahun							Rata-rata
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Sumatera Selatan	6,627	6,409	7,941	9,618	9,517	10,060	9,654	8,547
Jambi	3,381	4,583	4,198	4,824	5,244	4,430	4,799	4,494
Bengkulu	2,491	3,243	3,202	3,147	2,816	3,067	3,026	2,999
Bangka Belitung	2,287	2,468	2,666	2,996	2,624	3,108	2,462	2,659
Lampung	5,691	7,017	7,633	7,481	7,355	7,562	6,927	7,095
<b>Sumbagsel</b>	20,477	23,720	25,640	28,066	27,556	28,227	26,868	25,793

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Berdasarkan Tabel 5.2 dapat dilihat bahwa pengeluaran pemerintah tiap provinsi di Sumatera bagian selatan tahun 2016-2022 mengalami fluktuasi. Rata-rata pengeluaran pemerintah Sumatera bagian selatan sebesar 25,793 milyar rupiah. Pada tahun 2016 pengeluaran pemerintah di wilayah Sumatera bagian selatan sebesar 20,477 milyar rupiah dan terus mengalami kenaikan hingga tahun 2019 menjadi 28,066 milyar rupiah dan mengalami penurunan di tahun 2020 menjadi 27,566 milyar rupiah. Pengeluaran pemerintah tiap provinsi di Sumbagsel berbeda-beda dikarenakan berbagai faktor seperti faktor geografis dimana setiap wilayah memiliki luas yang berbeda dan faktor demografis dimana jumlah penduduk setiap provinsi berbeda sehingga pengeluaran pun akan ikut menyesuaikan jumlah kebutuhan tiap provinsi.

Rata-rata pengeluaran pemerintah tertinggi berada di Provinsi Sumatera Selatan yaitu sebesar 8,547 milyar rupiah kemudian yang kedua berada di provinsi Lampung sebesar 7,095 milyar rupiah selanjutnya provinsi Jambi dengan rata-rata pengeluaran pemerintah sebesar 4,494 milyar rupiah diikuti dengan provinsi Bengkulu sebesar 2,999 milyar rupiah dan rata-rata pengeluaran pemerintah terendah terdapat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu sebesar 2,659 milyar rupiah. Pengeluaran pemerintah di Sumatera bagian selatan mencerminkan upaya berkelanjutan untuk mendorong pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan fokus pada pengembangan sektor, peningkatan layanan publik, dan program sosial, pemerintah berupaya mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh tiap provinsi di Sumatera bagian Selatan

### 5.1.3 Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk di Sumatera bagian Selatan mencerminkan keanekaragaman sosial, budaya dan ekonomi di wilayah ini. Provinsi yang termasuk ke dalam regional Sumbagsel menampung populasi yang heterogen dengan setiap demografis dan geografis yang unik. Pertumbuhan penduduk yang stabil dan distribusi yang merata dari pedesaan dan perkotaan menunjukkan dinamika perkembangan sosial ekonomi yang terus berlangsung di Sumatera bagian selatan. Adapun jumlah penduduk setiap provinsi di Sumbagsel yaitu sebagai berikut :

**Tabel 5.3 Jumlah Penduduk pada 5 Provinsi di Sumatera Bagian Selatan  
Tahun 2016-2022 (Jiwa)**

Provinsi	Tahun							Rata-rata
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Sumatera Selatan	8.160.901	8.266.983	8.391.489	8.497.196	8.467.432	8.550.849	8.657.008	8.427.408
Jambi	3.458.926	3.515.017	3.570.272	3.624.579	3.548.228	3.585.124	3.631.134	3.561.897

Bengkulu	1.90 4.793	1.93 4.269	1.99 9.539	2.00 1.578	2.01 0.670	2.03 2.942	2.060. 092	1.991 .983
Bangka Belitung	1.40 1.827	1.43 0.865	1.45 9.873	1.48 8.792	1.45 5.678	1.47 3.165	1.494. 621	1.457 .832
Lampung	8.20 5.141	8.28 9.577	8.37 0.485	8.44 7.737	9.00 7.848	9.08 1.792	9.176. 545	8.654 .161

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Berdasarkan tabel 5.3 yang menunjukkan jumlah penduduk tiap provinsi di Sumatera bagian selatan terus mengalami kenaikan penduduk dari tahun 2016 hingga 2019 dan mengalami penurunan di tahun 2020 kemudian mengalami peningkatan kembali dari tahun 2021 hingga 2022. Rata-rata jumlah penduduk terbesar berada di Provinsi Lampung yaitu sebesar 8.654.161 jiwa diikuti provinsi Sumatera Selatan yaitu sebesar 8.427.408 jiwa, kemudian rata-rata jumlah penduduk Provinsi Jambi yaitu sebesar 3.561.897 jiwa, rata-rata jumlah penduduk Provinsi Bengkulu sebesar 1.991.983 jiwa dan rata-rata jumlah penduduk terendah di wilayah Sumatera bagian selatan yaitu berada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu sebesar 1.457.832 jiwa.

Tingginya jumlah penduduk di Provinsi Lampung dapat disebabkan oleh letak geografis yang strategis dekat dengan Pulau Jawa dimana memudahkan akses dan transportasi sehingga banyak orang yang memilih menetap disana. Namun tingginya jumlah penduduk Provinsi Lampung dibarengi dengan kepadatan penduduk yang tinggi pulau karena luas wilayah yang kecil dibandingkan dengan jumlah penduduk yang tinggi serta perbedaan luas wilayah setiap kabupaten/kota membuat kepadatan penduduk di Provinsi Lampung mempunyai persebaran penduduk yang bervariasi (Irham,2023).

Provinsi di Sumatera Bagian Selatan yang juga memiliki jumlah penduduk besar didukung oleh keberadaan kota-kota besar seperti Kota Palembang dan SDA

yang melimpah. Sebaliknya provinsi seperti Bengkulu dan Bangka Belitung memiliki jumlah penduduk yang lebih rendah dikarenakan faktor geografis, ekonomi, dan sejarah migrasi di wilayah tersebut. Provinsi Jambi dengan luas wilayah yang cukup besar, memiliki kepadatan penduduk yang bervariasi dengan daerah perkotaan yang lebih padat dibandingkan dengan daerah pedesaannya (Fitri,2019).

#### **5.1.4 Investasi (PMA)**

Investasi merupakan aktivitas yang vital dalam dunia keuangan dan ekonomi dimana investasi telah menjadi salah satu cara untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi baik di tingkat individu atau perusahaan ataupun di tingkat regional dan nasional. Potensi investasi dapat dilihat dari berbagai sektor seperti industri, pertanian, pariwisata dan teknologi, yang masing-masing menawarkan peluang unik bagi para investor. Melalui investasi dalam berbagai sektor perekonomian, suatu wilayah dapat memperluas kapasitas produksi, menciptakan lapangan kerja dan peningkatan daya saing. Perkembangan investasi di Sumatera bagian selatan menunjukkan tren yang menjanjikan, dengan banyaknya sektor yang menarik minat investor salah satunya dari pihak luar negeri. Investasi asing tentu dapat memainkan peran penting dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan mengembangkan sektor-sektor strategis di tiap provinsi Sumatera bagian selatan. Umumnya investasi asing ini diberikan dalam bentuk US Dollar dikarenakan mata uang tersebut merupakan standar umum dalam investasi internasional sehingga investor asing dapat menghindari resiko tambahan dan berpartisipasi dalam ekonomi indonesia dengan cara yang lebih aman dan terstandarisasi. Pada penelitian ini investasi asing atau PMA telah di konversikan dalam bentuk rupiah mengikuti nilai tukar US Dollar ke Rupiah sebesar 16.000 rupiah (Nilai tukar per april 2024). Adapun investasi asing di Sumatera bagian selatan yaitu sebagai berikut :

**Tabel 5.4 Investasi Asing pada 5 Provinsi di Sumatera Bagian Selatan tahun 2016-2022 (Milyar Rupiah)**

Provinsi	Tahun							Rata-rata
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Sumatera Selatan	44,696	18,927	17,256	11,783	24,702	20,155	19,604	22,446
Jambi	976	1,229	1,629	873	431	813	627	940
Bengkulu	891	2,218	2,185	2,317	3,076	379	834	1,700
Bangka Belitung	843	2,449	740	1,419	774	715	2,075	1,288
Lampung	1,371	1,929	2,116	2,483	7,974	2,780	3,965	3,231
<b>Sumbangsel</b>	<b>48,777</b>	<b>26,752</b>	<b>23,926</b>	<b>18,875</b>	<b>36,957</b>	<b>24,842</b>	<b>27,105</b>	<b>29,605</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Berdasarkan Tabel 5.4 yang menunjukkan rata-rata investasi asing (PMA) di wilayah Sumatera Bagian Selatan adalah 29,605 milyar rupiah yang pada setiap tahunnya mengalami fluktuasi dengan investasi tertinggi berada pada tahun 2016 sebesar 48,777 milyar rupiah dan yang terendah berada di tahun 2019 sebesar 18,875 milyar rupiah. Rata-rata PMA terbesar di wilayah Sumatera bagian selatan terdapat di Provinsi Sumatera Selatan sebesar 22,446 milyar rupiah diikuti Provinsi Lampung dengan rata-rata PMA sebesar 3,231 milyar rupiah. Selanjutnya Provinsi Bengkulu dan Kepulauan Bangka Belitung dengan masing-masing rata-rata PMA sebesar 1,700 milyar rupiah dan 1,288 milyar rupiah, rata-rata investasi asing terendah berada di Provinsi Jambi yaitu sebesar 940 juta rupiah.

Provinsi Sumatera Selatan menjadi provinsi dengan angka investasi asing tertinggi karena adanya kemudahan berinvestasi. Wilayah ini dikenal sebagai daerah *Zero Conflict* yang memberikan rasa nyaman bagi investor. Sumatera Selatan unggul dalam sektor pertambangan, industri pengolahan, serta pertanian dan kehutanan yang masing-masing menyumbang peningkatan rata-rata pertumbuhan ekonomi. Dukungan besar dalam penyediaan infrastruktur

menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk menarik investor asing ke provinsi ini.

Provinsi dengan realisasi penanaman modal asing terendah terdapat di Provinsi Jambi. Hal ini disebabkan prasarana dasar yang tersedia belum memenuhi kebutuhan dan tuntutan kualitas pelayanan yang meningkat. Kondisi geografis yang memerlukan sistem transportasi darat, sungai, laut dan udara yang terpadu untuk meningkatkan keterkaitan wilayah produksi pasar, dimana efisiensi ekonomi dalam distribusi barang dan jasa memerlukan dukungan infrastruktur transportasi yang memadai. Keterbatasan kemampuan pemerintah pusat dan daerah dalam membangun prasarana transportasi menghambat percepatan pembangunan, sehingga realisasi investasi asing di Provinsi Jambi masih rendah (Nuri, 2023).

#### **5.1.5 Indeks Pembangunan Manusia**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan upaya peningkatan kualitas hidup manusia. IPM tidak hanya mengevaluasi pendapatan ekonomi, tetapi juga memberikan pandangan yang komprehensif tentang kesejahteraan manusia. Dengan memperhitungkan dimensi kesehatan, pendidikan dan standar hidup, IPM membantu pemerintah dalam mengarahkan prioritas pembangunan yang lebih fokus dan efektif serta meningkatkan kesetaraan di dalam masyarakat. Semakin tinggi nilai IPM suatu wilayah, semakin baik kondisi hidup masyarakatnya. IPM menjadi alat yang berguna untuk membandingkan kemajuan pembangunan manusia baik antar negara maupun daerah. IPM di Sumatera bagian selatan menunjukkan tren yang beragam antar provinsi, meskipun terdapat perbedaan dalam nilai pembangunan manusia di setiap provinsi, keseluruhan wilayah ini menunjukkan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara bertahap. Faktor geografis, demografis dan sosial ekonomi memainkan peran penting dalam menentukan capaian IPM di setiap kabupaten dan kota tiap provinsi di Sumatera bagian selatan. Adapun indeks pembangunan manusia pada tiap provinsi di Sumatera bagian selatan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 5.5 Indeks Pembangunan Manusia pada 5 Provinsi di Sumatera Bagian Selatan Tahun 2016-2022 (Persen)**

Provinsi	Tahun							Rata-rata
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Sumatera Selatan	68.24	68.86	69.39	70.02	70.01	70.24	70.90	69.67
Jambi	69.62	69.99	70.65	71.26	71.29	71.63	72.14	70.94
Bengkulu	69.33	69.95	70.64	71.21	71.40	71.64	72.16	70.90
Bangka Belitung	69.55	69.99	70.67	71.30	71.47	71.69	72.24	70.99
Lampung	67.65	68.25	69.02	69.57	69.69	69.90	70.45	69.22

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Berdasarkan Tabel 5.5 dapat diketahui nilai IPM setiap Provinsi di Sumatera bagian selatan berstatus kategori tinggi dimana pada tahun 2022 lima provinsi di Sumbagsel nilai IPM nya mencapai > 70% dan mengalami kenaikan setiap tahunnya. Rata-rata IPM tertinggi di Sumatera bagian selatan yaitu berada di Provinsi Bangka Belitung yaitu sebesar 70,99%. Di urutan kedua tertinggi berada di Provinsi Jambi sebesar 70,94%, di urutan ketiga, Provinsi Bengkulu dengan rata-rata nilai IPM nya sebesar 70.90 diikuti Provinsi Sumatera Selatan sebesar 69,67% dan rata-rata nilai IPM terendah berada di Provinsi Lampung sebesar 69,22%.

Peningkatan nilai IPM setiap tahun di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dikarenakan fokus pemerintah daerahnya yang tinggi dalam meningkatkan akses terhadap pendidikan berkualitas dan menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan serta perkembangan manusia. Sedangkan rendahnya IPM di Provinsi Lampung di karenakan keterbatasan akses terhadap pendidikan berkualitas, layanan kesehatan yang belum merata dan tingkat kemiskinan yang masih tinggi sehingga diperlukan upaya khusus pada perbaikan layanan dasar, pengembangan infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Dari penjelasan di atas. Provinsi Sumatera Selatan menonjol dalam hal pertumbuhan ekonomi, PDRB, pengeluaran pemerintah, dan investasi asing, meskipun tidak memiliki IPM tertinggi. Sebaliknya, Bangka Belitung dengan PDRB

lebih kecil justru memiliki IPM tertinggi, yang mungkin menunjukkan fokus yang kuat pada peningkatan kualitas hidup meskipun dengan sumber daya ekonomi yang lebih terbatas. Provinsi Jambi, meskipun memiliki PDRB yang lebih rendah daripada Sumatera Selatan, juga memiliki IPM yang lebih baik, menunjukkan bahwa distribusi ekonomi tidak selalu berkorelasi langsung dengan kualitas hidup. Bengkulu, meski dengan PDRB dan pengeluaran pemerintah yang kecil, mampu mencatat IPM yang relatif tinggi. Lampung, dengan jumlah penduduk terbesar, memiliki tantangan dalam meningkatkan IPM meskipun dengan PDRB yang besar, karena perolehan ekonominya perlu dibagi di antara populasi yang lebih besar. Hal ini menunjukkan bahwa meski PDRB dan pertumbuhan ekonomi penting, pengeluaran pemerintah, investasi, dan upaya dalam pengembangan manusia juga sangat berperan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat di setiap provinsi.

## **5.2. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Jumlah Penduduk, Investasi Asing dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Provinsi di Wilayah Sumbagsel Tahun 2016-2022**

Rumusan masalah kedua penelitian yaitu menganalisis pengaruh dari pengeluaran pemerintah, jumlah penduduk, investasi dan IPM terhadap Pertumbuhan Ekonomi di tiap Provinsi yang ada di wilayah Sumatera bagian selatan. Oleh karena itu untuk mengetahui jawaban dari rumusan tersebut menggunakan regresi data panel dengan kurun waktu antara 2016 hingga 2022 dan cross sectionnya yaitu 5 provinsi di Sumatera Bagian Selatan. Adapun penjabaran dari hasil pengolahan data panel yaitu sebagai berikut :

### **5.2.1 Pemilihan Model Data Panel**

Dalam data panel, terdapat tiga uji untuk menentukan model terbaik dalam pengujian dengan hasilnya sebagai berikut :

#### **a. Uji Chow**

Pengujian ini mencoba untuk menentukan model manakah yang terbaik di antara *Common Effect Model* atau *Fixed Effect Model* dalam melakukan

pengestimasi data panel. Adapun Pedoman dalam uji ini ialah jika nilai Probability F lebih besar dari  $\alpha$  (0,05) maka model Common Effect. Sedangkan, jika nilai Probability F lebih kecil dari  $\alpha$  (0,05). maka model Fixed Effect, hasil pengujian uji chow dapat dilihat pada Gambar 5.1 berikut ini :

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	1997.770775	(4,26)	0.0000
Cross-section Chi-square	200.593169	4	0.0000

Sumber : Pengolahan data pada Eviews 12, (2024)

### Gambar 1 Hasil Uji Chow

Hasil pengujian dari uji chow dapat dilihat pada nilai prob *cross section Chi-Square* yaitu 0,0000 nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga *Fixed Effect Model* merupakan model terbaik data panel, selanjutnya dilakukan uji hausman dalam memilih FEM dan REM sebagai model terbaik.

#### b. Uji Hausman

Uji ini melakukan pengujian dalam rangka menentukan model terbaik yang digunakan pada regresi data panel yaitu antara Fixed Effect ataupun Random Effect. Apabila nilai probability Chi-Square lebih besar dari  $\alpha$  (0,05), maka model Random effect yang dipilih. Sedangkan, jika nilai probability Chi-Square lebih kecil dari  $\alpha$  (0,05), maka model Fixed Effect. Adapun hasil pengujiannya sebagai berikut :

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	7991.071702	4	0.0000

Sumber : Pengolahan data pada Eviews 12, (2024)

### Gambar 2 Hasil Uji Hausman

Nilai prob *Cross Section Random* yang dapat dilihat pada Gambar 7 sebesar 0,0000 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 dengan demikian model terbaik yang terpilih adalah *Fixed Effect Model*. Setelah melakukan pengujian uji chow

dan uji hausman, Fixed Effect Model di tetapkan sebagai model terbaik yang digunakan dalam penelitian ini sehingga tidak perlu dilakukan uji lagrange multiplier (pengujian untuk memilih antara REM dan CEM).

### 5.2.2 Uji Asumsi Klasik

Model data panel yang terpilih adalah Fixed Effect Model yang menggunakan metode ordinary Least Square (OLS) dimana uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji multikolinearitas dan uji heterokedastisitas saja. Berikut ini hasil uji asumsi klasiknya antara lain :

#### a. Uji Multikolinearitas

Uji ini memiliki tujuan untuk menilai apakah dalam model regresi terdapat korelasi diantara variabel independen..Uji ini dapat dikenali dengan melihat nilai korelasi diantara variabel independen tersebut. Menurut Ghozali (2018) model regresi dianggap tidak mengalami masalah multikolinearitas jika nilai korelasi antar variabelnya kurang dari 0,80

**Tabel 5.6 Hasil Uji Multikolinearitas**

	<b>PP</b>	<b>JP</b>	<b>INV</b>	<b>IPM</b>
<b>PP</b>	1,000000	- 0,679346	0,54970 7	-0,409386
<b>JP</b>	-0,679346	1,000000	- 0,297708	0,184250
<b>INV</b>	0,595802	- 0,297708	1,00000 0	-0,381544
<b>IPM</b>	-0,409386	0,184250	- 0,381544	1,000000

Sumber : Pengolahan data pada Eviews 12, (2024)

Hasil uji multikolinearitas pada tabel 5.6 Menunjukkan nilai korelasi antar variabel independen (pengeluaran pemerintah, jumlah penduduk, investasi dan

IPM) kurang dari 0,80 dengan demikian tidak terdapat gejala multikolinearitas pada model regresi.

**b. Uji Heterokedastisitas**

Uji heteroskedastisitas ini merupakan pengujian yang menguji terkait adanya perbedaan pada varian dari residual pada keseluruhan pengamatan pada model regresi. Pengujian ini dapat dikerjakan dengan melakukan penregresian pada nilai absolute residual dengan variabel – variabel independen dalam model. Berikut ini hasil pengujiannya :

**Tabel 5.7 Hasil Uji Heterokedastisitas**

<b>Variabel</b>	<b>Coefficient</b>	<b>Std. Error</b>	<b>t-Statistic</b>	<b>Prob.</b>
C	0,575369	0,580071	0,991894	0,3304
PP	-0,001913	0,013104	-0,145962	0,8851
JP	-0,101074	0,099677	-1,014011	0,3199
INV	0,001298	0,002642	0,491112	0,6275
IPM	0,001410	0,001443	1,976897	0,3376

Sumber : Pengolahan data pada Eviews 12, (2024)

Dari hasil uji heterokedastisitas pada Tabel 5.7 Menunjukkan bahwa nilai prob setiap variabel independennya lebih besar dari nilai signifikansi 0,05 dengan demikian tidak terdapat gejala heterokedastisitas pada model regresi.

**5.2.3 Uji Hipotesis**

Adapun uji statistik yang digunakan dalam penelitian ini meliputi uji koefisien regresi secara bersama – sama (Uji F), uji koefisien regresi secara individu (Uji t). Berikut ini hasil pengujian hipotesis antara lain :

**a. Uji F**

Pengujian ini dapat dilihat berdasarkan F-Statistik berdasarkan lebih besar atau kecilnya dari alpha 5% atau 0,05. Adapun pedoman yang digunakan dalam melakukan pengujian kali ini ialah apabila nilai probabilitas F-statistik lebih kecil dari  $\alpha$ , maka variabel berpengaruh secara simultan. Hal ini berlaku juga

sebaliknya, apabila nilai F-statistik lebih besar dari  $\alpha$  maka variabel tidak berpengaruh secara simultan.

**Tabel 5.8 Hasil Uji F**

F-Statistic	Prob(F-Statistic)
1577,06	0,0000

Sumber : Pengolahan data pada Eviews 12, (2024)

Nilai prob hasil uji F pada tabel 5.8 Sebesar  $0,0000 < 0,05$  dan nilai F-statistic nya sebesar  $1577,06 > 2,690$  sehingga dapat diambil kesimpulan semua variabel independen (pengeluaran pemerintah, jumlah penduduk, investasi dan IPM) secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel terikatnya (pertumbuhan ekonomi).

**b. Uji t**

Pengujian ini terkait signifikansi pengaruh variabel bebas secara terpisah terhadap variabel terikat dan dengan asumsi variabel lain bersifat tetap. Adapun pedoman dalam melakukan uji ini ialah jika nilai signifikansi variabel lebih kecil dari  $\alpha$  (0,05) maka secara individu variabel independen tersebut berpengaruh terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui nilai dari  $t_{tabel}$  dengan taraf signifikansi 5% menggunakan perhitungan  $df1 = n - k$  dimana  $n$  ialah jumlah observasi sebanyak 35 dan  $k$  ialah semua variabel penelitian yaitu 5 variabel sehingga dapat diketahui  $df1 = 35 - 5 = 30$  dengan melihat tabel nilai  $t$  maka nilai  $t_{tabel}$  sebesar 2,042. Hasil uji t dapat dilihat sebagai berikut :

**Tabel 5.9 Hasil Uji t**

<b>o</b>	<b>Variabel</b>	<b>t-Statistic</b>	<b>Prob</b>
	Pengeluaran Pemerintah	2,22926 6	0,03 46
	Jumlah Penduduk	- 0,203272	0,84 05
	Investasi Asing (PMA)	- 0,479981	0,63 53
	Indeks Pembangunan Manusia	12.2244	0,00

		5	00
--	--	---	----

Sumber : Pengolahan data pada Eviews 12, (2024)

Jika dilihat hasil uji t pada Tabel 5.9 diketahui nilai p-value dan dari masing-masing variabel menunjukkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Nilai prob Variabel Pengeluaran Pemerintah lebih kecil dari  $\alpha$  ( $0,0346 < 0,05$ ) dan nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$  ( $2,229266 > 2,042$ ) dengan demikian variabel pengeluaran pemerintah mempunyai pengaruh yang signifikansi terhadap pertumbuhan ekonomi.
2. Nilai prob Variabel Jumlah Penduduk lebih besar dari  $\alpha$  ( $0,8405 > 0,05$ ) dan nilai  $t_{hitung}$  lebih kecil dari  $t_{tabel}$  ( $0,203272 < 2,042$ ) dengan demikian variabel jumlah penduduk tidak mempunyai pengaruh yang signifikansi terhadap pertumbuhan ekonomi.
3. Nilai prob Variabel Investasi lebih besar dari  $\alpha$  ( $0,6353 > 0,05$ ) dan nilai  $t_{hitung}$  lebih kecil dari  $t_{tabel}$  ( $0,479981 < 2,042$ ) dengan demikian variabel investasi tidak mempunyai pengaruh yang signifikansi terhadap pertumbuhan ekonomi.
4. Nilai prob Variabel IPM lebih kecil dari  $\alpha$  ( $0,0000 < 0,05$ ) dan nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$  ( $12,22445 > 2,042$ ) dengan demikian variabel IPM mempunyai pengaruh yang signifikansi terhadap pertumbuhan ekonomi.

#### 5.2.4 Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi *Adjusted R-Square* merupakan uji yang menunjukkan besaran pengaruh dari variabel – variabel independen yang digunakan terhadap variabel dependen. Ukuran dari uji ini terdiri dari 0 sampai 1. Nilai ini mengindikasikan tingkat koefisien determinasi yang mendekati angka 0 merepresentasikan bahwa kecilnya pengaruh dari variabel – variabel bebas terhadap variabel terikat sedangkan jika nilai mendekati angka 1 mempresentasikan pengaruh yang cukup besar. Berikut ini hasil dari Koefisien determinasi *Adjusted R-Square* :

**Tabel 5.10 Hasil Pengujian Koefisien Determinasi**

R-Squared	0,999791
Adjusted R-Squared	0,999727

Sumber : Pengolahan data pada Eviews 12, (2024)

Berdasarkan hasil pengujian dari regresi data panel dengan metode FEM yang menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi pada *R-Squared* sebesar 0,999727 atau sebesar 99% maka dapat diambil kesimpulan bahwa pengeluaran pemerintah, jumlah penduduk, investasi, dan indeks pembangunan manusia dapat menjelaskan dengan sangat baik terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 99% sedangkan 1% lainnya dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian.

### 5.2.5 Interpretasi Regresi Data Panel Metode FEM

Hasil pengolahan data pada software eviews dengan uji chow dan uji hausman menunjukkan bahwa model data panel yang digunakan adalah model FEM, Adapun hasil dari regresi data panel yaitu :

**Tabel 5.11 Interpretasi Regresi Data Panel**

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob
C	8,601756	1,042867	8,2348179	0,0000
PP	0,052520	0,023559	2,229266	0,0346
JP	-0,036427	0,179202	-0,203272	0,8405
INV	-0,002280	0,004750	-0,479981	0,6353
IPM	0,031718	0,002595	12.22445	0,0000

Sumber : Pengolahan data pada Eviews 12, (2024)

Berdasarkan hasil regresi data panel dengan melihat Tabel 5.11 dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut :

$$LogPDRB_{it} = \beta_0 + \beta_1 LogPP_{it} + \beta_2 LogJP_{it} + \beta_3 LogINV_{it} + \beta_4 IPM_{it} + e_{it}$$

$$\text{LogPDRB}_{it} = 8,601756 + 0,052520\text{LogPP}_{it} - 0,036427\text{LogJP}_{it} - 0,002280\text{LogINV}_{it} + 0,031718\text{IPM}_{it} + e_{it}$$

Berdasarkan hasil analisis data dan persamaan diatas, dengan demikian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Nilai konstanta sebesar 8,601756 yang artinya apabila asumsi pengeluaran pemerintah, jumlah penduduk, investasi, dan IPM bernilai sama dengan nol maka pertumbuhan ekonomi akan bernilai sebesar 8,601756
2. Nilai koefisien regresi variabel pengeluaran pemerintah sebesar 0,052520 dan menjelaskan pengaruh positif pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya apabila pengeluaran pemerintah mengalami kenaikan setiap 1% maka akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sebesar 0,052520 dengan asumsi variabel lainnya bernilai konstan atau tetap.
3. Nilai koefisien regresi variabel jumlah penduduk sebesar -0,036427 dan menjelaskan pengaruh negatif jumlah penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya apabila jumlah penduduk mengalami penurunan setiap 1% maka akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sebesar 0,036427 dengan asumsi variabel lainnya bernilai konstan atau tetap.
4. Nilai koefisien regresi variabel investasi sebesar -0,002280 dan menjelaskan pengaruh negatif investasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya apabila investasi mengalami penurunan setiap 1% maka akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sebesar 0,002280 dengan asumsi variabel lainnya bernilai konstan atau tetap.
5. Nilai koefisien regresi variabel indeks pembangunan manusia sebesar 0,031718 dan menjelaskan pengaruh positif indeks pembangunan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya apabila indeks pembangunan manusia mengalami kenaikan setiap 1% maka akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sebesar 0,031718 dengan asumsi variabel lainnya bernilai konstan atau tetap.

Berdasarkan hasil estimasi data panel dengan model FEM menunjukkan bahwa terdapat perbedaan nilai intersep pada 5 provinsi yang ada di Sumatera bagian selatan yang berarti setiap provinsi memiliki besaran pertumbuhan ekonomi yang beraneka ragam sesuai dengan nilai intersep dari masing-masing provinsi. Adapun nilai konstanta efek individu pada 5 provinsi di Sumatera bagian selatan sebagai berikut :

**Tabel 5.12 Efek Individu**

<b>Provinsi</b>	<b>Koefisien</b>	<b>Efek Individu</b>
Jambi	0.064280278	8.666036
Sumatera Selatan	0.428354547	9.030110
Bengkulu	-0.443472847	8.158283
Lampung	0.331657497	8.933413
Bangka Belitung	-0.380819476	8.220936

Sumber : Pengolahan data pada Eviews 12, (2024)

Berdasarkan Tabel 5.12 dapat dilihat bahwa setiap provinsi di Sumbagsel menunjukkan nilai konstanta yang terhubung dengan faktor-faktor pengeluaran pemerintah, jumlah penduduk, investasi dan indeks pembangunan manusia. Apabila variabel-variabel tersebut mengalami peningkatan sebesar 1% maka akan berdampak pada tingkat ketimpangan pendapatan di setiap provinsi di Sumbagsel. Berikut ini penjelasan mengenai nilai konstanta pada persamaan regresi pertumbuhan ekonomi di tiap provinsi Sumbagsel yaitu :

1. Nilai konstanta Provinsi Jambi sebesar 8,666036. Hal ini dapat diartikan bahwa setiap variabel pengeluaran pemerintah, jumlah penduduk, investasi dan indeks pembangunan manusia nilainya sama dengan nol atau tetap, maka pertumbuhan ekonomi akan mengalami peningkatan sebesar 8,666036.
2. Nilai konstanta Provinsi Sumatera Selatan sebesar 9,030110. Hal ini dapat diartikan bahwa setiap variabel pengeluaran pemerintah, jumlah penduduk,

investasi dan indeks pembangunan manusia nilainya sama dengan nol atau tetap, maka pertumbuhan ekonomi akan mengalami peningkatan sebesar 9,030110.

3. Nilai konstanta Provinsi Bengkulu sebesar 8,158293. Hal ini dapat diartikan bahwa setiap variabel pengeluaran pemerintah, jumlah penduduk, investasi dan indeks pembangunan manusia nilainya sama dengan nol atau tetap, maka pertumbuhan ekonomi akan mengalami peningkatan sebesar 8,158283.
4. Nilai konstanta Provinsi Lampung sebesar 8,933413. Hal ini dapat diartikan bahwa setiap variabel pengeluaran pemerintah, jumlah penduduk, investasi dan indeks pembangunan manusia nilainya sama dengan nol atau tetap, maka pertumbuhan ekonomi akan mengalami peningkatan sebesar 8,933413.
5. Nilai konstanta Provinsi Bangka Belitung sebesar 8,220936. Hal ini dapat diartikan bahwa setiap variabel pengeluaran pemerintah, jumlah penduduk, investasi dan indeks pembangunan manusia nilainya sama dengan nol atau tetap, maka pertumbuhan ekonomi akan mengalami peningkatan sebesar 8,220936.

### **5.3. Hasil Pembahasan**

#### **5.3.1 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Berdasarkan hasil regresi data panel bahwa Pengeluaran Pemerintah memperoleh nilai koefisien sebesar 0,052520 dan nilai probabilitas sebesar  $0,0346 < 0,05$  yang menjelaskan bahwa setiap pengeluaran pemerintah mengalami kenaikan 1% maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,052520 dengan asumsi variabel dianggap tetap, dengan demikian pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Bagian Selatan dalam kurun waktu 2016-2022.

Hasil temuan ini konsisten dengan penelitian Agustina (2019) yang menyatakan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah berkaitan dengan peningkatan pertumbuhan PDRB, yang mencerminkan dampak langsung dan tidak

langsung dari pengeluaran tersebut pada perekonomian. Penelitian oleh Ichvani & Sasana (2019) yang menyatakan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah untuk penyediaan dan perbaikan infrastruktur akan memperlancar proses produksi barang dan jasa yang pada akhirnya akan mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh teori Keynes juga mendukung hal ini, yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dapat memainkan peran stabilisator ekonomi yang mana pemerintah diharapkan untuk meningkatkan pengeluarannya selama periode resesi untuk merangsang permintaan agregat dan mengurangi pengangguran begitu pula sebaliknya. Dengan cara tersebut pengeluaran pemerintah membantu menjaga stabilitas ekonomi dan menciptakan kondisi yang lebih stabil dan dapat diprediksi untuk pertumbuhan jangka panjang.

### **5.3.2 Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Berdasarkan hasil regresi data panel bahwa jumlah penduduk memperoleh nilai koefisien sebesar  $-0,036427$  dan nilai probabilitas sebesar  $0,8405 > 0,05$  yang menjelaskan bahwa setiap jumlah penduduk mengalami kenaikan 1% maka akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sebesar  $0,036427$  dengan asumsi variabel dianggap tetap, dengan demikian jumlah penduduk memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Bagian Selatan dalam kurun waktu 2016-2022.

Temuan ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Handayani et al., (2016) yang menyatakan bahwa jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, ini artinya peningkatan jumlah penduduk dapat mengurangi PDRB per Kapita karena pertumbuhan penduduk di suatu wilayah yang lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan PDRB. Meskipun peningkatan jumlah penduduk diharapkan dapat meningkatkan kualitas output pembangunan, kenyataannya jumlah penduduk yang besar tidak otomatis menjadi keunggulan dalam pembangunan jika tidak diiringi dengan peningkatan kualitas. Jika kuantitas penduduk meningkat tajam tanpa peningkatan kualitas maka penduduk justru dapat menjadi beban pembangunan. Sehingga penting dilakukannya peningkatan kualitas dan

produktifitas penduduk serta mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Penelitian lain oleh Yenny & Anwar (2020) juga mengatakan bahwa jumlah penduduk tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam penelitiannya pertumbuhan ekonomi tidak dikarenakan adanya jumlah populasi melainkan disebabkan oleh pendapatan asli daerah dan infrastruktur yang ada karena jumlah penduduk yang tinggi namun tidak memberikan sumbangsih yang produktif untuk wilayahnya.

### **5.3.3 Pengaruh Investasi Asing (PMA) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Berdasarkan hasil regresi data panel bahwa investasi memperoleh nilai koefisien sebesar  $-0,002280$  dan nilai probabilitas sebesar  $0,6353 > 0,05$  yang menjelaskan bahwa setiap investasi mengalami kenaikan 1% maka akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sebesar  $0,002280$  dengan asumsi variabel dianggap tetap, dengan demikian investasi memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Bagian Selatan dalam kurun waktu 2016-2022.

Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian oleh Asiyan, (2012) dimana hasil pengolahan data menunjukkan bahwa penanaman modal asing tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang disebabkan oleh pertumbuhan PMA yang fluktuatif, mencerminkan masih kurangnya kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di wilayah tersebut. Tidak berpengaruhnya investasi asing juga dikarenakan tata kelola infrastruktur dan komunikasi antar pengusaha dan pemerintah masih kurang baik dan perlu diperbaiki seperti infrastruktur bidang transportasi, hal ini sangat penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi karena dapat menekan biaya distribusi dan meningkatkan efisiensi ekonomi.

Penelitian lain oleh Mardalena (2019) juga menyatakan tidak berpengaruhnya investasi terhadap pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh ketidakstabilan politik dan ekonomi yang membuat lingkungan bisnis tidak tertarik bagi investor, ketidakpastian kebijakan pemerintah, regulasi yang sering berubah dan birokrasi

yang rumit dapat mengurangi minat investor untuk menanamkan modal dalam jangka panjang, hal tersebut dapat menyebabkan investasi tidak menghasilkan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

#### **5.3.4 Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Berdasarkan hasil regresi data panel bahwa Indeks Pembangunan Manusia memperoleh nilai koefisien sebesar 0,052520 dan nilai probabilitas sebesar 0,0346 < 0,05 yang menjelaskan bahwa setiap Indeks Pembangunan Manusia mengalami kenaikan 1% maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,052520 dengan asumsi variabel dianggap tetap, dengan demikian Indeks Pembangunan Manusia memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Bagian Selatan dalam kurun waktu 2016-2022.

Penelitian ini sesuai dengan temuan Arifin & Fadhlana, (2021) yang menyatakan bahwa indeks pembangunan manusia akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pembangunan manusia adalah proses memperluas pilihan bagi penduduk, jika pembangunan di percepat melalui pemerataan pendidikan dan kesehatan maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat melalui produktifitas yang lebih tinggi dan lebih banyak kesempatan kerja.

Temuan ini juga sesuai dengan penelitian Wididarma & Jember (2015) yang menyatakan bahwa komponen indeks pembangunan manusia berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi kualitas modal manusia yang diukur melalui IPM sebagai modal dalam pembangunan ekonomi maka pertumbuhan ekonomi akan terwujud dan terus meningkat.

#### **5.4. Implikasi Kebijakan**

Pertumbuhan ekonomi merupakan topik yang penting dalam analisis ekonomi dan pembuatan kebijakan publik. Kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dapat memiliki dampak yang signifikan pada berbagai aspek ekonomi termasuk

pengeluaran pemerintah, jumlah penduduk, investasi dan IPM. Adapun implikasi kebijakan yang dapat diberikan yaitu sebagai berikut :

1. Pengeluaran pemerintah merupakan aspek dalam menentukan arah dan kecepatan pertumbuhan ekonomi. Perlu dilakukan kebijakan yang berfokus pada alokasi dana ke bidang infrastruktur yang memudahkan arus barang dan jasa serta perlu menekankan pentingnya pengeluaran sektor pendidikan dan kesehatan dengan tujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan pengeluaran pada program-program sosial guna mengurangi ketidaksetaraan dan mendukung masyarakat.
2. Kebijakan terkait jumlah penduduk terkait aspek sosial seperti program keluarga berencana dengan tujuan mengendalikan laju pertumbuhan penduduk sehingga beban pada layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan dapat dikurangi. Selain itu peningkatan akses terhadap layanan kesehatan berpotensi menurunkan angka kematian dan meningkatkan kesehatan umum.
3. Kebijakan investasi mencakup peningkatan daya tarik sebagai tujuan investasi asing dan domestik melalui penyederhanaan perizinan dan peningkatan infrastruktur seperti jalan dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif. Selain itu insentif pajak dan kemudahan akses ke zona ekonomi khusus di wilayah dapat menarik investasi di sektor utama perekonomian.
4. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat menjadi salah satu strategi untuk mengurangi ketimpangan pendapatan. Ini mencakup upaya untuk meningkatkan akses pendidikan yang berkualitas, pelayanan kesehatan yang terjangkau, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program-program yang inklusif dan berkelanjutan.

Dengan mengintegrasikan saran-saran ini dalam perencanaan dan implementasi kebijakan pembangunan di Sumatera Bagian Selatan, diharapkan dapat tercapai pertumbuhan yang signifikan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.